BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui “Nawa Bhakti Satya” yang diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah. Konteks perencanaan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sebagai dokumen perencanaan

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk disusun atas Dasar :

a. Landasan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum baik program, kegiatan, dan perencanaan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja (Renja) Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat eselon III.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, disajikan data hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**77%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**	**273%**	**273%**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disusun; Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan		
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ Perangkat Daerah yang disusun; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Perangkat Daerah yang disusun	100%	0%	100%	100%	100%	Laporan		
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	100%	0%	100%	100%	100%	Orang/ Bulan		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dalam daerah dan luar daerah	100%	100%	100%	99%	99%	Dokumen		
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen		
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan		
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**84%**	**100%**	**87%**	**87%**	**100%**	**271%**	**271%**
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	0%	100%	100%	100%	Paket		
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya senam kesegaran jasmani bagi ASN	100%	84%	100%	73%	73%	Orang		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun**	**100%**	**84%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**	**280%**	**280%**
1.06.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	85%	100%	92%	92%	Paket		
1.06.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia; Makan Minum Karyawan	100%	85%	100%	100%	100%	Paket		
1.06.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	85%	100%	86%	86%	Paket		
1.06.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia	100%	85%	100%	100%	100%	Dokumen		
1.06.01.2.05.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	85%	100%	100%	100%	Laporan		
1.06.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makan Minum Rapat	100%	78%	100%	100%	100%	Laporan		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	0%	100%	100%	100%	Unit		
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	0%	100%	100%	100%	Unit		
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**85%**	**100%**	**91%**	**91%**	**100%**	**276%**	**276%**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	100%	85%	100%	73%	73%	Laporan		
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	100%	85%	100%	100%	100%	Laporan		
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	100%	85%	100%	100%	100%	Laporan		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**100%**	**85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**285%**	**285%**
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	100%	85%	100%	100%	100%	Unit		
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor; Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	100%	85%	100%	100%	100%	Unit		
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor; Terlaksananya rehab gedung kantor	100%	85%	100%	100%	100%	Unit		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Presentase PSKS yang Aktif**	**85%**	**78%**	**85%**	**82%**	**96%**	**85%**	**245%**	**288%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**0%**	**85%**	**80%**	**94%**	**85%**	**165%**	**194%**
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah. (Perbankkan/ Bank, Toko/ Swalayan, Instansi dll)	85%	0%	85%	80%	94%	Dokumen		
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**78%**	**85%**	**84%**	**98%**	**85%**	**247%**	**291%**
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pekerja sosial masyarakat (PSM) daerah Kabupaten	85%	75%	85%	85%	100%	Orang		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Daerah Kabupaten	85%	85%	85%	85%	100%	Orang		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kelembagaan karang taruna di Kabupaten/ Kota	85%	75%	85%	81%	95%	Lembaga		
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**85%**	**84%**	**85%**	**83%**	**98%**	**87%**	**254%**	**299%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar dan Penanganan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan**	**85%**	**81%**	**85%**	**85%**	**99%**	**87%**	**253%**	**297%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Pengemis di Luar Panti Sosial								
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya penanganan permasalahan anak dan PPKS lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk	85%	0%	85%	85%	100%	Orang		
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Penanganan ABH dan Permasalahan Anak Lainnya di Wilayah Kab. Nganjuk	0%	75%	0%	0%	0%	0%	75%	0%
		Terlaksananya bantuan sosial bagi disabilitas; Terlaksananya BOP bantuan sosial bagi disabilitas	85%	0%	85%	85%	100%	Orang		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya pemberian bantuan sosial untuk lansia miskin; Terlaksananya verifikasi/pendataan, distribusi, monev, dan laporan penyaluran bansos lansia miskin	85%	87%	85%	85%	100%	Orang		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Hibah PMI; Terlaksananya penanganan PPKS tanggap darurat dan kejadian luar biasa	85%	0%	85%	83%	98%	Orang		
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Terwujudnya Rehabilitasi Sosial dan Penanganan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**85%**	**86%**	**85%**	**82%**	**96%**	**87%**	**255%**	**300%**
1.06.04.2.02.02	**Pemberian Layanan Kedaruratan**	**Terlaksananya Penanganan PMKS, Sosialisasi TRC, Bimtek TRC, Penanganan Masalah**	**0%**	**85%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**85%**	**0%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Strategi tentang Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa; Hibah PMI								
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya kebutuhan bahan pangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	85%	0%	85%	85%	100%	Orang		
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya penanganan eks psikotik dan penderita gangguan jiwa berbasis keluarga; Tersedianya pelayanan Sosial dan penampungan sementara bagi PPKS	85%	87%	85%	77%	91%	Orang		
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga PMKS	0%	87%	0%	0%	0%	0%	87%	0%

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian bekal bagi orang terlantar dari luar daerah	85%	0%	85%	80%	94%	Orang		
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bantuan Sosial LKSA; Kerjasama dengan lembaga rehabilitasi dalam penanganan masalah sosial; Terlaksananya pembinaan bagi pengurus LKSA dan Perguruan Silat	85%	0%	85%	85%	100%	Orang		
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85%**	**86%**	**85%**	**75%**	**88%**	**87%**	**248%**	**292%**
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Terwujudnya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**0%**	**87%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**87%**	**0%**
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); Terlaksananya Bansos Panti Asuhan	0%	87%	0%	0%	0%	0%	87%	0%

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan Data Fakir Miskin**	**85%**	**85%**	**85%**	**75%**	**88%**	**87%**	**247%**	**291%**
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimtek operator DTKS; Terlaksananya fasilitasi verifikasi dan validasi data kemiskinan	85%	85%	85%	70%	82%	Keluarga		
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya bantuan sosial siswa miskin; Terlaksananya BLT DBHCHT; Terlaksananya BOP bantuan sosial siswa miskin; Terlaksananya BOP BLT DBHCHT	85%	0%	85%	80%	94%	Keluarga		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Pelayanan PMKS**	**85%**	**87%**	**85%**	**83%**	**98%**	**87%**	**257%**	**302%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**85%**	**87%**	**85%**	**83%**	**98%**	**87%**	**257%**	**302%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Tersedianya kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat akibat bencana alam maupun sosial	85%	87%	85%	83%	98%	Orang		
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Presentase Fasilitasi TMP**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**100%**	**85%**	**255%**	**300%**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**100%**	**85%**	**255%**	**300%**
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpelihara sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	85%	85%	85%	85%	100%	Makam		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**									

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**100%**	**92%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**	**290%**	**290%**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya PPRG di Kabupaten Nganjuk**	**100%**	**93%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**293%**	**293%**
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Pembuatan Buku PUG dan PPRG Kabupaten Nganjuk	100%	0%	100%	100%	100%	Dokumen		
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi bagi Tim Fokal Point OPD dan Desa serta Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi	100%	0%	100%	100%	100%	Dokumen		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pembinaan PUG bagi Lembaga Pemerintah	100%	0%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah		
		Terlaksananya Pelaksanaan TOT bagi Tim Focal Point OPD	0%	93%	0%	0%	0%	0%	93%	0%
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang PUG dan Modul Pelatihan PUG dan PPRG bagi Focal Point OPD dan Desa Serta Pedamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tingkat Kecamatan dan Desa	100%	0%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah		
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	**100%**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**290%**	**290%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	0%	90%	0%	0%	0%	0%	90%	0%
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100%	0%	100%	100%	100%	Organisasi		
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan**	**100%**	**0%**	**100%**	**96%**	**96%**	**100%**	**196%**	**196%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota	**Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Workshop Bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, serta Perguruan Tinggi**								
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya tenaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	100%	0%	100%	95%	95%	Lembaga		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100%	0%	100%	97%	97%	Orang		
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**289%**	**325%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penguatan Kelembagaan KLA dan Terwujudnya Fasilitasi Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**289%**	**325%**
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah WCC	89%	0%	100%	100%	100%	Orang		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pendampingan korban di Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama	89%	89%	100%	100%	100%	Layanan		
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN**	**Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**100%**	**92%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100%**	**483%**	**483%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	KUALITAS KELUARGA									
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Workshop Bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, serta Perguruan Tinggi**	**100%**	**90%**	**100%**	**95%**	**95%**	**100%**	**285%**	**285%**
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan serta alat edukasi untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	100%	0%	100%	95%	95%	Perangkat Daerah		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	95%	95%	Dokumen		
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	95%	95%	Laporan		
		Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kemandirian Industri Kreatif	0%	90%	0%	0%	0%	0%	90%	0%
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah**	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan**	**100%**	**0%**	**100%**	**97%**	**97%**	**100%**	**197%**	**197%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten/ Kota dan Workshop Bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, serta Perguruan Tinggi**								
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	Lembaga		
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	95%	95%	Orang		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Optimalisasi peran forum Puspa)	100%	0%	100%	95%	95%	Dokumen		
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**93%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**293%**	**293%**
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam	100%	0%	100%	100%	100%	Layanan		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan optimalisasi peran forum Puspaga								
		Terlaksananya Fasilitasi dan Optimalisasi PUSPAGA dalam Pengasuhan Alternatif Anak	0%	93%	0%	0%	0%	0%	93%	0%
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Data Gender dan Anak untuk Penyusunan PPRG**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200%**	**200%**
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di	Terlaksananya sosialisasi aplikasi data gender dan anak	100%	0%	100%	100%	100%	Dokumen		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku profil gender	100%	0%	100%	100%	100%	Dokumen		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dan Kepentingan Terbaik Anak**	**100%**	**45%**	**80%**	**79%**	**99%**	**100%**	**224%**	**224%**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan/ Desa Layak Anak serta Fasilitasi Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak**	**100%**	**89%**	**80%**	**79%**	**99%**	**100%**	**268%**	**268%**

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi Kecamatan Layak Anak dan meningkatkan kualitas peran lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha dalam perlindungan anak	100%	0%	80%	80%	100%	Organisasi		
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengurus Forum Anak; Terlaksananya Kegiatan Kongres Anak; Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Kecamatan; Terlaksananya Pengiriman Delegasi Forum Anak Jawa Timur dan Forum Anak Nasional	100%	0%	80%	78%	98%	Dokumen		
		Terlaksananya Pertemuan Pengurus FA dan Gugus Tugas KLA dan Temu Anak	0%	89%	0%	0%	0%	0%	89%	0%

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sosialisasi Program Pengembangan KLA bagi Masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Meningkatnya Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100%**	**89%**	**100%**	**94%**	**94%**	**100%**	**283%**	**283%**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**	**100%**	**89%**	**100%**	**94%**	**94%**	**100%**	**283%**	**283%**
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan	Terlaksananya penjangkauan,	100%	0%	100%	94%	94%	Perangkat Daerah		

Kode rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	pendampingan, konseling, penanganan kasus, dan layanan medis bagi korban kekerasan terhadap anak								
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman ASN dan Lembaga Peduli Anak terhadap Program Kegiatan yang Responsif Pemenuhan Hak Anak	0%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah										

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 2.1 terdapat capaian sebesar 97% dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 terdapat beberapa perubahan. Pada Sub Kegiatan Tahun 2021 dan 2022 terdapat pergeseran sub kegiatan dan perubahan pada indikator sub kegiatan, sehingga beberapa sub kegiatan menjelaskan perbedaan indikator dan realisasi yang berisi angka 0 (nol). Selain itu, masih belum lengkapnya sarana dan prasarana serta SDM menyebabkan belum optimalnya pelayanan dan kinerja pada tahun 2021, maka diperlukan kebijakan/tindakan untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam penanganan PMKS maupun korban bencana. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, untuk itu perlu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan tindak kekerasan dalam lingkup keluarga dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	96%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan rutin mengikuti berjalannya angkas	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pemberdayaan Sosial	96%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan mengikuti menyesuaikan jadwal kegiatan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Rehabilitasi Sosial	98%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Beberapa kegiatan dalam tahap pelaksanaan karena berkaitan dengan kriteria PMKS/PPKS dan pencairan bansos	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	88%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Penanganan Bencana	87%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pemberian bahan makanan menyesuaikan terjadinya	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana

bencana baik sosial maupun alam	berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pemeliharaan TMP masih dalam proses pelaksanaan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	99%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Perlindungan Perempuan	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penanganan kasus perempuan menyesuaikan jumlah kasus yang dilaporkan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	97%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	Sangat Tinggi

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	99%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Perlindungan Khusus Anak	94%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penanganan kasus anak menyesuaikan jumlah kasus yang dilaporkan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Rumus penghitungan	Kondisi 2022	Target tahun (%)		
				2024	2025	2026
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	PPMI = $\frac{\text{JPMI}}{\text{JPI}}$ x 100%	1,36	0,5	0,3	0,1
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG = $\frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$	69,78	70,50	71,00	71,25

Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini

Indikator Kinerja Kunci

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Kondisi 2022 (%, Skor)	Target Tahun (%)		
			2024	2025	2026
1	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	71,40	72,5	73	74
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	24,40	33,33	42,26	51,19
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100	100
5	Skor Kabupaten Layak Anak	(575) Pratama	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama

Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA akan dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra Dinas Sosial PPPA 2018-2023					Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		88%	90%	92%	94%	95%	-	99,57%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		88%	90%	92%	94%	95%	-	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		88%	90%	92%	94%	95%	-	90,91%	86%	100%	100%	
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		88%	90%	92%	94%	95%	-	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah warga negara korban bencana daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%		88%	90%	92%	94%	95%	-	100%	100%	100%	100%	

2.2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Isu Strategis Bidang Urusan Sosial :

1. Adanya verifikasi dan validasi data PPKS/ PMKS/ DTKS
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PPKS/ PMKS
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
5. Penertiban mekanisme Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gartis Berhadiah (UGB) melalui perluasan sosialisasi Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Isu Strategis Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender kepada Masyarakat
2. Peningkatan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam implementasi gender
3. Perlu Pembentukan UPT PPA
4. Pembentukan aplikasi pengelolaan data gender dan anak

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Urusan Bidang Sosial

1. Data PPKS/ PMKS/ DTKS yang masih perlu validasi secara berkelanjutan
2. Sarana Prasarana pendukung layanan PPKS/ PMKS belum terpenuhi
3. Masih perlu peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung layanan PPKS/ PMKS
4. Peran serta lembaga masyarakat dalam penanganan kemiskinan masih rendah
5. Tingginya kegiatan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan Undian Gartis Berhadiah (UGB) yang berpotensi mengandung unsur penipuan dan kerugian masyarakat

Permasalahan Urusan Bidang PPPA

1. Pemahaman dan penerapan gender di masyarakat masih perlu ditingkatkan
2. Implementasi kebijakan gender mainstreaming dan gender budgeting belum berjalan optimal
3. Perlu ditingkatkannya kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Psikolog Klinis dan Konselor
4. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu masih kurang maksimal
5. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran
6. Belum adanya dukungan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak berupa UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sesuai amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 76 ayat 2 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi Kabupaten/ Kota wajib memiliki UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal tersebut didukung dengan Pasal 90 ayat 2 terkait pembentukan UPT. PPA dilakukan paling lambat 3 Tahun terhitung sejak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 di undangkan (9 Mei 2022).
7. Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti Pekerja Anak, Perkawinan Anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
8. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti Pornografi, Pelecehan Seksual, dan Penipuan, terlihat dari Kasus Pornografi dan Cybercrime
9. Belum tersedianya aplikasi pengelolaan Data Gender dan Anak

2.2.3 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial PPPA pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di daerah tertentu yang belum bisa dijangkau oleh pelayanan sosial.

2. Kabupaten Nganjuk belum mempunyai shelter dengan fasilitas memadai untuk menampung PMKS bermasalah/terlantar
3. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
4. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
5. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
6. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen antar lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
2. Adanya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani masalah sosial, baik melalui pelatihan maupun rekruitmen.
3. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
5. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 urusan. Urusan sosial kelompok sasarannya adalah masyarakat miskin hal ini seiring dengan tujuan renstra untuk pengentasan angka kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2024-2026. Sedangkan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kelompok sasarannya adalah korban dan pelaku kekerasan serta masyarakat maupun kelompok organisasi untuk peningkatan penanganan kasus serta pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kelompok sasaran layanan lainnya adalah perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dan integrasi dalam menjalankan tujuan dari 2 urusan tersebut.

2.2.5 Mitra Dinas Sosial PPPA dalam Pemberian Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberian layanan di dukung oleh beberapa mitra kerja sehingga dalam pelaksanaannya terdapat koordinasi yang baik, yaitu:

a. BPJS berkaitan dengan pengurusan KIS
b. Dinas Kependuudkan dan Pencatatan sipil berkaitan dengan pengurusan kependudukan, pengecekan data PMKS, dan data kependudukan
c. Dinas Kesehatan berkaitan dengan rekomendasi klien Dinas Sosial PPPA
d. RSU Nganjuk dan RSU Kertosono berkaitan dengan rujuk pasien kategori PMKS/PPKS
e. PPA Polres berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan
f. Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Kemenag berkaitan dengan Forum Anak
g. BPBD berkaitan dengan korban bencana alam maupun social

2.2.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 menjalin kerjasama dengan Radio Cakra Krisna. Hal ini di buktikan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/MOU/CAKRAKRSN/I/2023.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
2. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
3. Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

4. Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
5. Jumlah warga negara korban bencana daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.7 Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk sampai Tahun 2022

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2019 (7)	Target SDGs Tahun 2021 (8)	Capaian SDGs Tahun 2021 (9)	Status (10)
1.3.1.a"	Persentase Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial PPPA	%	85	100	74,94	Akan Tercapai
1.3.1.b"	Persentase Penyandang Cacat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial PPPA	%	85	100	100	Tercapai
1.3.1.c"	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial PPPA	%	85	100	85,71	Akan Tercapai
1.3.1.d"	Persentase lanjut usai terlantar yang Terpenuhi kebutuhan dasar melalui UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Banyuwangi, Bondowoso, Blitar, Magetan, Jember, Pasuruan, dan UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Jombang	Dinas Sosial PPPA	%	85	100		
1,4,2'	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)						

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2019 (7)	Target SDGs Tahun 2021 (8)	Capaian SDGs Tahun 2021 (9)	Status (10)

3.5.1.(c)"	Jumlah Anak nakal dan eks korban napza yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial melalui UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Napza Surabaya	Dinas Sosial PPPA	%	100	100	100	Tercapai

Tujuan 5: Kesetaraan Gender							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2019 (7)	Target SDGs Tahun 2021 (8)	Capaian SDGs Tahun 2021 (9)	Status (10)
5.1.1*"	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Sosial PPPA	%	100	100	41,16	Usaha Keras
5.2.1.(a)"	Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur	Dinas Sosial PPPA	%	100	100	100	Tercapai
5.2.1*	Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Dinas Sosial PPPA	%	100	100	100	Tercapai

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2019 (7)	Target SDGs Tahun 2021 (8)	Capaian SDGs Tahun 2021 (9)	Status (10)
16.2.1.(b)"	Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Kab. Nganjuk	Dinas Sosial PPPA	%	100	100	100	Tercapai

2.3 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adanya kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak menjadi dampak Inflasi pada Tahun 2022. Dinas Sosial PPPA dalam hal ini bergerak dalam pemberian bantuan berupa Beras bagi masyarakat guna membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Nganjuk yang terdampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak untuk mencukupi kebutuhan pokok.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan RKPD 2023, tapi akan terdapat beberapa kegiatan yang dirasa penting untuk dilaksanakan yang belum bisa direalisasikan di tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan RKPD dari tahun 2018-2019 masih banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terkait terbatasnya anggaran, di Dinas Sosial PPPA terdapat beberapa kegiatan yang merupakan kegiatan DWP sehingga membutuhkan anggaran yang cukup mengingat kegiatan DWP merupakan salah satu penunjang dalam pencapaian tujuan dan tercapainya indikator perangkat daerah dalam memberdayakan perempuan dan masyarakat. Berikut ini rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru yang akan dimasukkan dalam RKPD 2024 :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pengadaan Mebel
  3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

- **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
2. Pemberian Layanan Kedaruratan

3. Penyediaan Permakanan
4. Penyediaan Alat Bantu
5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak
8. Pemberiaan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11. Pemberian Layanan Rujukan
12. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/ Kota

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- **Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**
  1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
  2. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota
  2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
  3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**
  1. Penyediaan Makanan
  2. Penyediaan Sandang
  3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
  4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
  5. Pelayanan Dukungan Psikososial
- **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
  2. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**
  1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan
  2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi dan Singkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  2. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota
  3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
  4. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
  1. Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
  2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
  3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  2. Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

- **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
    1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    3. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
    4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
    1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
    3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**
    1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

D. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
  3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
  4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan untuk rancangan awal RKPD tahun 2024 akan dijelaskan dalam Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	URUSAN BIDANG SOSIAL					**URUSAN BIDANG SOSIAL**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DINSOS PPPA	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan, Barang Milik Daerah, Kepegawaian, serta Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya yang disusun tepat waktu**	**100%**	**6.492.534.742**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	DINSOS PPPA	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan, Barang Milik Daerah, Kepegawaian, serta Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya yang disusun tepat waktu**	**100%**	**6.492.534.742**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi**	**100%**	**22.789.148**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi**	**100%**	**22.789.148**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14.073.413	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14.073.413	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.715.735	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.715.735	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**4.433.592.241**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**4.433.592.241**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	4.210.413.638	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	4.210.413.638	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	214.986.923	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	214.986.923	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4.095.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	4.095.840	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4.095.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4.095.840	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**9.975.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**9.975.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	9.975.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	9.975.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**84.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**84.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	42.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	42.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42.000.000	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**224.812.755**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**224.812.755**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11.262.059	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11.262.059	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109.394.786	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	109.394.786	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka	Paket	45.431.405	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka	Paket	45.431.405	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.780.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.780.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	33.174.199	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	33.174.199	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	21.770.306	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	21.770.306	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan**	**100%**	**735.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan**	**100%**	**735.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	262.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	262.500.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	262.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	262.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	210.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	210.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**261.345.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**261.345.000**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Pemerintahan Daerah yang Tersedia					**Pemerintahan Daerah yang Tersedia**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	166.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	166.320.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	86.625.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	86.625.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**100%**	**721.020.598**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**100%**	**721.020.598**	
	Penyediaan Jasa Pemelihaaraan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	289.094.306	Penyediaan Jasa Pemelihaaraan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	289.094.306	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	157.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	157.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44.638.407	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44.638.407	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	229.787.885	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	229.787.885	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	480.220.437	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase PSKS yang Aktif**	**85%**	480.220.437	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**26.829.889**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**26.829.889**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	26.829.889	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	26.829.889	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**453.390.548**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85%**	**453.390.548**	
	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenganan Kab/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22.932.000	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenganan Kab/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22.932.000	
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	275.630.483	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	275.630.483	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	52.500.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kab/kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	52.500.000	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	23.578.065	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	23.578.065	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi	Sertifikat	78.750.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi	Sertifikat	78.750.000	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)		Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)		Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**85%**	**10.915.748.443**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial**	**85%**	**10.915.748.443**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		**Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapat Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85%**	**875.975.604**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapat Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85%**	**875.975.604**	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	71.675.604	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	71.675.604	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	804.300.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	804.300.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Jumlah PPKS/ PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapat Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85%**	**10.039.772.839**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Jumlah PPKS/ PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapat Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85%**	**10.039.772.839**	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.753.510.853	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.753.510.853	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberian layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	731.285.651	Pemberian layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	731.285.651	
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	370.780.400	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	370.780.400	
	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21.000.000	
	penyediaan alat bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25.211.768	penyediaan alat bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25.211.768	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	232.611.167	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	232.611.167	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.750.000	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.750.000	
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu	Orang	10.500.000	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu	Orang	10.500.000	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak		Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota			Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak		Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberiaan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.500.000	Pemberiaan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.500.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.750.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.750.000	
	pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11.550.000	pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11.550.000	
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.750.000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15.750.000	
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang	825.573.000	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kab/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang	825.573.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Jumlah Peningkatan Orang yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85%**	**1.125.626.084**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Jumlah Peningkatan Orang yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85%**	**1.125.626.084**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		**Jumlah Anak Terlantar yang Terpelihara**	**85%**	**17.561.250**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Jumlah Anak Terlantar yang Terpelihara**	**85%**	**17.561.250**	
	Penjangkauan anak-anak terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.500.000	Penjangkauan anak-anak terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.500.000	
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.061.250	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.061.250	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval**	**85%**	**1.108.064.834**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval**	**85%**	**1.108.064.834**	
	Pendataan Fakir miskin cakupan daerah Kab/kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	7.875.000	Pendataan Fakir miskin cakupan daerah Kab/kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	7.875.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	160.964.834	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	160.964.834	
	Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	928.725.000	Fasilitasi bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	928.725.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.500.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10.500.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85%**	**258.853.936**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85%**	**258.853.936**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan**	**85%**	**255.703.936**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan**	**85%**	**255.703.936**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					**Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**			
	Penyediaan makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	249.403.936	Penyediaan makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	249.403.936	
	Penyediaan sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	Penyediaan sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	
	Pelayanan dukungan psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	Pelayanan dukungan psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		**Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**85%**	**3.150.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**85%**	**3.150.000**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1.575.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1.575.000	
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.575.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**Persentase Pengelolaan TMP**	**85%**	**159.155.842**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Pengelolaan TMP**	**85%**	**159.155.842**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		**Jumlah Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan TMP**	**85%**	**159.155.842**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan TMP**	**85%**	**159.155.842**	
	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	99.750.000	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	99.750.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	59.405.842	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	59.405.842	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**Persentase Lembaga Pemerintah dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pembinaan**	**100%**	**238.980.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase Lembaga Pemerintah dan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pembinaan**	**100%**	**238.980.000**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG**	**100%**	**97.180.125**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG**	**100%**	**97.180.125**	
	Koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7.938.000	Koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG		Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7.938.000	
	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	53.140.500	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	53.140.500	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27.176.625	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27.176.625	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	8.925.000	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	8.925.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100%**	**41.036.625**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100%**	**41.036.625**	
	Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	31.500.000	Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	31.500.000	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9.536.625	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9.536.625	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan**	**100%**	**100.763.250**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan**	**100%**	**100.763.250**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**			**Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**			
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	10.473.750	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	10.473.750	
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	48.289.500	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	48.289.500	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	42.000.000	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	42.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Aktif**	**100%**	**304.320.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Aktif**	**100%**	**304.320.000**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani**	**100%**	**30.897.195**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani**	**100%**	**30.897.195**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Dokumen	15.147.195	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap	Dokumen	15.147.195	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	15.750.000	Advokasi Kebijakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	15.750.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani**	**100%**	**246.570.000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani**	**100%**	**246.570.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	231.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	231.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	15.570.000	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	15.570.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100%**	**26.852.805**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100%**	**26.852.805**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10.500.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10.500.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	12.862.500	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	12.862.500	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1.050.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1.050.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2.440.305	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2.440.305	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kualitas Keluarga**	**100%**	**156.849.975**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Kualitas Keluarga**	**100%**	**156.849.975**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**79.109.722**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**79.109.722**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	16.537.500	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	16.537.500	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	46.034.722	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	46.034.722	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	16.537.500	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	16.537.500	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100%**	**44.099.670**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**		**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100%**	**44.099.670**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	16.537.280	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	16.537.280	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16.537.390	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16.537.390	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	11.025.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	11.025.000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak**	**100%**	**33.640.583**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak**	**100%**	**33.640.583**	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	33.640.583	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	33.640.583	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100%**	**19.326.825**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100%**	**19.326.825**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**	**100%**	**19.326.825**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**	**100%**	**19.326.825**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	11.025.000	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	11.025.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8.301.825	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	8.301.825	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100%**	**642.073.352**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100%**	**642.073.352**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA**	**100%**	**248.323.352**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA**	**100%**	**248.323.352**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	74.951.037	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	74.951.037	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	173.372.315	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	173.372.315	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga		**Jumlah Kecamatan yang Menyediakan Layanan**	**100%**	**393.750.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga**		**Jumlah Kecamatan yang Menyediakan Layanan**	**100%**	**393.750.000**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**Peningkatan Kualitas Hidup Anak**			**Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Peningkatan Kualitas Hidup Anak**			
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	52.500.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	52.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	157.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	157.500.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	105.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	105.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	78.750.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	78.750.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**Persentase Peningkatan Pelayanan Perlindungan Khusus Perempuan**	**100%**	**915.600.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Peningkatan Pelayanan Perlindungan Khusus Perempuan**	**100%**	**915.600.000**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang		**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani**	**100%**	**285.600.000**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang**		**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani**	**100%**	**285.600.000**	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					**Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	180.600.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	180.600.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	105.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	105.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus Anak**	**100%**	**472.500.000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus Anak**	**100%**	**472.500.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	157.500.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	157.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	Layanan	131.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	Layanan	131.250.000	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	105.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	105.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	78.750.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	78.750.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**157.500.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**157.500.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	52.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	52.500.000	

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	52.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	52.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	52.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	52.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.9 Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaan sasaran pembangunan tahun 2018, maka arah kebijakan pembangunan bidang-bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak difokuskan pada :

Kebijakan Umum Proritas urusan wajib sosial di tetapkan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
b. Program Pemberdayaan Sosial
c. Program Rehabilitasi Sosial
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Program Penanganan Bencana
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diprioritaskan pada :

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Program Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f. Program Perlindungan Khusus Anak

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran strategis Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, yaitu:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Tahun (%)		
					2022	2024	2025	2026
1	**Mengurangi penduduk miskin**		**Persentase Penduduk miskin ekstrim**	**%**	**1,36**	**0,5**	**0,3**	**0,1**
		Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	%	100	100	100	100
			Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	%	71,40	72,5	73	74
2	**Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan**		**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Indeks**	**69,78**	**70,50**	**71,00**	**71,25**
		Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender	%	24,40	33,33	42,26	51,19
			Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	%	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Tahun (%)		
					2022	2024	2025	2026
			Skor Kabupaten Layak Anak	Skor	(575) Pratama	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Tabel 5. T-C. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**17.874.999.806,00**							**21.498.723.390,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.968.754.456,00**							**19.226.565.066,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**16.968.754.456,00**							**19.226.565.066,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***	**77 Nilai**			**77 Nilai**	**5.469.290.606,00**						**77 Nilai**	**6.091.340.735,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi*	79 %			77 %	22.887.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	79 %	27.370.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			4 Laporan	12.150.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	4 Laporan	15.633.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			4 Laporan	10.737.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	4 Laporan	11.737.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun*	79 %			77 %	4.244.026.706,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	78 %	4.618.458.898,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan			24 Orang/bulan	3.984.683.706,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	24 Orang/bulan	4.330.711.170,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen			12 Dokumen	252.083.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	12 Dokumen	279.322.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	3.630.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	1 Laporan	4.212.864,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan			18 Laporan	3.630.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	18 Laporan	4.212.864,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun*	79 %			77 %	67.502.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	78 %	107.002.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket			45 Paket	17.502.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	24 Paket	18.502.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			40 Orang	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	2 Orang	88.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun*	79 %			77 %	205.811.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	78 %	252.137.140,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			12 Paket	8.442.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	2 Paket	11.583.832,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			7 Paket	102.365.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	4 Paket	130.050.050,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			5 Paket	34.516.150,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	2 Paket	51.188.910,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	1 Dokumen	2.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			12 Laporan	34.207.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	2 Laporan	34.122.033,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			12 Laporan	24.479.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	1 Laporan	22.392.315,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan*	79 %			77 %	109.221.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	78 %	227.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			5 Unit	49.914.350,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	1 Unit	11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			6 Unit	59.307.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	2 Unit	216.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*	79 %			77 %	422.449.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	78 %	263.172.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			2 Laporan	1.725.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	2 Laporan	3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan			36 Laporan	135.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	3 Laporan	171.072.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	285.424.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	12 Laporan	89.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat*	79 %			77 %	397.391.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	78 %	596.199.397,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit			31 Unit	288.482.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	30 Unit	326.841.744,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit			3 Unit	1.455.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	50 Unit	9.504.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit			51 Unit	6.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	25 Unit	23.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			5 Unit	100.704.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinsos PPPA	3 Unit	236.353.253,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial***	**85 %**			**85 %**	**293.984.100,00**						**85 %**	**353.209.375,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	85 %			85 %	13.961.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	14.961.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen			4 Dokumen	13.961.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	4 Dokumen	14.961.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota*	85 %			85 %	280.022.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	338.247.575,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang			100 Orang	16.234.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	50 Orang	24.078.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang			20 Orang	250.274.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	20 Orang	289.412.007,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga			80 Lembaga	13.513.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	50 Lembaga	24.756.968,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS***	**85 %**			**85 %**	**2.424.826.950,00**						**85 %**	**3.134.929.977,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti*	85 %			85 %	1.285.164.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	1.767.987.380,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang			125 Orang	37.216.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	125 Orang	78.843.164,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1290 Orang			420 Orang	766.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	430 Orang	884.730.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1030 Orang			325 Orang	481.948.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	350 Orang	804.414.216,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti*	85 %			85 %	1.139.662.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	1.366.942.597,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3401 Orang			1050 Orang	185.059.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1121 Orang	190.235.014,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Orang			95 Orang	167.502.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	110 Orang	255.872.283,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang			24 Orang	5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	26 Orang	12.705.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	63 Dokumen			22 Dokumen	782.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	21 Dokumen	908.130.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial***	**85 %**			**85 %**	**8.480.817.200,00**						**85 %**	**9.287.632.017,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval*	85 %			85 %	8.480.817.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	9.287.632.017,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	600253 Keluarga			214620 Keluarga	204.762.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	198839 Keluarga	177.061.317,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15166 Keluarga			4.434 Keluarga	8.276.054.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	5200 Keluarga	9.110.570.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangan***	**85 %**			**85 %**	**232.486.850,00**						**85 %**	**287.076.829,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial*	85 %			85 %	11.487.050,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	36.744.329,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang			550 Orang	11.487.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 Orang	36.744.329,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota*	85 %			85 %	220.999.800,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	250.332.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang			68 Orang	220.999.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	18 Orang	250.332.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Pengelolaan TMP***	**85 %**			**85 %**	**67.348.750,00**						**85 %**	**72.376.133,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP*	85 %			85 %	67.348.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	85 %	72.376.133,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1686 Makam			560 Makam	67.348.750,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	562 Makam	72.376.133,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**906.245.350,00**							**2.272.158.324,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**906.245.350,00**							**2.272.158.324,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah***	**100 %**			**100 %**	**266.000.000,00**						**100 %**	**750.775.774,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG*	100 %			100 %	64.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	121.203.337,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	8.334.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	15.650.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	55.797.525,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Perangkat Daerah	34.650.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		28.535.456,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Perangkat Daerah	7.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		28.535.456,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan BIdang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota*	100 %			100 %	18.200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	52.575.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	8.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	4 Dokumen	33.075.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Organisasi	10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		19.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan*	100 %			100 %	183.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	576.997.437,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65 Lembaga			65 Lembaga	9.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	65 Lembaga	10.997.437,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3175 Orang			2000 Orang	165.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1725 Orang	125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen			1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	441.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan***	**100 %**			**100 %**	**172.826.800,00**						**100 %**	**358.197.320,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani*	100 %			100 %	150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	320.985.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370 Orang			370 Orang	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	370 Orang	320.985.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan*	100 %			100 %	22.826.800,00			-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	37.212.320,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			8 Dokumen	22.826.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	4 Dokumen	37.212.320,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender***	**100 %**			**100 %**	**121.343.700,00**						**100 %**	**218.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	100 %			100 %	55.899.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	93.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Perangkat Daerah			50 Perangkat Daerah	9.857.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	50 Perangkat Daerah	21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen			1 Dokumen	36.041.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	51.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan*	100 %			100 %	29.931.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	63.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 Lembaga			50 Lembaga	9.986.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	50 Lembaga	21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			50 Orang	9.972.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	50 Orang	21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	9.972.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak*	100 %			100 %	35.512.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	62.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	330 Layanan			100 Layanan	35.512.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	110 Layanan	62.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak***	**100 %**			**100 %**	**18.530.000,00**						**100 %**	**28.656.500,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*	100 %			100 %	18.530.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	28.656.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen			20 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	20 Dokumen	15.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	7.530.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	2 Dokumen	13.156.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak***	**100 %**			**100 %**	**231.260.450,00**						**100 %**	**341.023.730,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA*	100 %			100 %	231.260.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	341.023.730,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi			1 Organisasi	119.482.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	1 Organisasi	118.982.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			5 Dokumen	111.777.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	3 Dokumen	222.040.930,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus***	**100 %**			**100 %**	**96.284.400,00**						**100 %**	**575.505.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani*	100 %			100 %	6.715.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	189.630.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota														
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	30 Dokuman			30 Dokuman	6.715.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	30 Dokuman	189.630.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak*	100 %			100 %	68.267.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	303.187.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55 Orang			50 Orang	63.531.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	55 Orang	165.375.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				100 Orang	4.736.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		137.812.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	100 %			100 %	21.301.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	100 %	82.687.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan			10 Kegiatan	21.301.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	2 Kegiatan	82.687.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H							**17.874.999.806,00**							**21.498.723.390,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. *Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran*
2. *Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Responsif Gender*

Kebijakan operasional dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 direncanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.150.000,- untuk melaksanakan Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.737.000,- untuk melaksanakan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.984.683.706,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 252.083.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.630.000,- untuk

melaksanakan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LAporan Keuangan

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.630.000,- untuk melaksanakan Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.502.750,- untuk melakasanakan Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk melaksanakan jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 8.442.500,- untuk melaksanakan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 102.365.650,- untuk melaksanakan Jumlah paket bahan ligistik kantor yang disediakan.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 34.516.150,- untuk melaksanakan Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 1.800.000,- untuk melaksanakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 34.207.200,- untuk melaksanakan Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 24.479.800,- untuk melaksanakan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  1. Pengadaan Mebel. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 49.914.350,- untuk melaksanakan Jumlah paket mebel yang disediakan.
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 59.307.600,- untuk melaksanakan Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 1.725.000,- untuk melaksanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 135.300.000,- untuk melaksanakan Jumlah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 285.424.000,- untuk melaksanakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 288.482.500,- untuk melaksanakan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
  2. Pemeliharaan Mebel. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 1.455.000,- untuk melaksanakan Jumlah mebel yang dipelihara.
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 6.750.000,- untuk melaksanakan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 100.704.400,- untuk melaksanakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- **Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 13.961.700,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

- **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 16.234.100,- untuk melaksanakan Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 250.274.900,- untuk melaksanakan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 13.513.400,- untuk melaksanakan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 37.216.800,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp.

766.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Pemberian Layanan Kedaruratan. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 481.948.000,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

1. Penyediaan Permakanan. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 185.059.200,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 167.502.950,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/ Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 782.100.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 204.762.300,- untuk melaksanakan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 8.276.054.900,- untuk melaksanakan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan

Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**

  1. Penyediaan Makanan. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 11.487.050,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**

  1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 220.999.800,- untuk melaksanakan Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**

  1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 67.348.750,- untuk melaksanakan Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Singkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 7.200.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 15.650.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 34.650.000,- untuk melaksanakan Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 7.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Sosialisasi Peningkatan Partiasipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 8.200.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 9.500.000,- untuk melaksanakan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 165.800.000,- untuk melaksanakan Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 8.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia.

B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- **Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 150.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 22.826.800,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 9.857.500,- untuk melaksanakan Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 36.041.700,- untuk melaksanakan Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 10.000.500,- untuk melaksanakan Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 9.986.500,- untuk melaksanakan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 9.972.500,- untuk melaksanakan Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 9.972.500,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 35.512.500,- untuk melaksanakan Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia.

D. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- **Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 11.000.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 7.530.000,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 119.482.800,- untuk melaksanakan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi. Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 111.777.650,- untuk melaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 6.715.700,- untuk melaksanakan Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota
- **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 63.531.400,- untuk melaksanakan Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota.
  2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 4.736.100,- untuk melaksanakan Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
- **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  1. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 21.301.200,- untuk melaksanakan Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK

Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1	PP3 – Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Rp. 12.405.709.200,00

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2024)	Alokasi (2024)
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani	100%	Rp. 11.138.131.000,00
		Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	72,5%	Rp. 361.332.850
2	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33,33%	Rp. 405.873.700,00
		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100%	Rp. 269.111.200,00
		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya	Rp. 231.260.450,00

Tabel 4.3 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
1	2					3	4	8	9	10
						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			17.874.999.806,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.968.754.456,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			16.968.754.456,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77 Nilai	5.469.290.606,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	77 %	22.887.000,00	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.150.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.737.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	77 %	4.244.026.706,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3.984.683.706,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	252.083.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.630.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.630.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	77 %	67.502.750,00	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	17.502.750,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	50.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	77 %	205.811.300,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.442.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	102.365.650,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.516.150,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.207.200,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.479.800,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan	77 %	109.221.950,00	
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	49.914.350,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	59.307.600,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	77 %	422.449.000,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.725.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	135.300.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.424.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat	77 %	397.391.900,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	288.482.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	1.455.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	6.750.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.704.400,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %	293.984.100,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	85 %	13.961.700,00	
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	13.961.700,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85 %	280.022.400,00	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	16.234.100,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	250.274.900,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga	13.513.400,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85 %	2.424.826.950,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	85 %	1.285.164.800,00	
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	37.216.800,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	766.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Orang	481.948.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85 %	1.139.662.150,00	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1050 Orang	185.059.200,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	167.502.950,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	5.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	22 Dokumen	782.100.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	8.480.817.200,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	85 %	8.480.817.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	214620 Keluarga	204.762.300,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5234 Keluarga	8.276.054.900,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangan	85 %	232.486.850,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	85 %	11.487.050,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	11.487.050,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	85 %	220.999.800,00	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	220.999.800,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMP	85 %	67.348.750,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP	85 %	67.348.750,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	560 Makam	67.348.750,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			906.245.350,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			906.245.350,00	
7	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah	100 %	266.000.000,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG	100 %	64.500.000,00	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.200.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.650.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	34.650.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	7.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan BIdang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 %	18.200.000,00	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.200.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Organisasi	10.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	183.300.000,00	
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65 Lembaga	9.500.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1725 Orang	165.800.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	8.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
8	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100 %	172.826.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani	100 %	150.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	370 Orang	150.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	22.826.800,00	
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	22.826.800,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
9	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender	100 %	121.343.700,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	55.899.700,00	
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	9.857.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	36.041.700,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 %	29.931.500,00	
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50 Lembaga	9.986.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	9.972.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.972.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak	100 %	35.512.500,00	
	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Layanan	35.512.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
10	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100 %	18.530.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %	18.530.000,00	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen	11.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.530.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
11	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak	100 %	231.260.450,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA	100 %	231.260.450,00	
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	119.482.800,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	111.777.650,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
12	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	96.284.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
							Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani	100 %	6.715.700,00	
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota				
							Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	30 Dokuman	6.715.700,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak	100 %	68.267.500,00	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	63.531.400,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Orang	4.736.100,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.301.200,00	
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota				
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	21.301.200,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	J U M L A H								**17.874.999.806,00**	

Tabel 4.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Penyandang Disabilitas	420 Orang	@ Rp. 1.800.000	DAU
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Hibah PMI	1 Lembaga	@ Rp. 400.000.000	DAU
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	LKSA	22 Lembaga	@ Rp. 777.100.000	DAU
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Lansia Miskin dan Siswa Miskin	1.116 Siswa ; 4.068 Lansia Miskin	@ Rp. 750.000; @ Rp. 1.800.000	DAU
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Hibah WCC	1 Lembaga	@ Rp. 150.000.000	DAU

BAB V
PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
b. Di dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih butuh ketelatenan dan kesabaran
c. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024] dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program , kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN,harus

memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, dan visi misi Kepala daerah terpilih.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakankoordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.

Nganjuk, 09 Desember 2022

Plt. BUPATI NGANJUK

MARHAEN DJUMADI

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001